**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN PADA DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR**

Oleh :

**ERIK KISWANTO**

**NPM. 128122067**

# ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program PNPM di Kota Banjar, dilihat dari berbagai aspek baik capaian kegiatan maupun dari segi sasaran yang telah dicapai, dan tentu dari hal tersebut diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PNPM oleh Dinas Ciptakarya, kebersihan, tataruang dan lingkungan hidup kota banjar khususnya maupun oleh berbagai pihak terkait pada umumnya.

Metode penelitian yang digunakan penelitin dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara yakni; observasinon partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi sesuai dengan tradisi studi sosial

Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kota banjar, secara umum dilaksanakan dengan cukup baik dan berhasil, dan Dinas Ciptakarya sebagai leading sector dalam fasilitasi program ini juga sudah melaksanakan program ini dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian secara fisik yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana lapangan PNPM MP di Kota Banjar yang telah berhasil menyelesaikan berbagai masalah infrastruktur kewilayahan dengan memberdayakan potensi-potensi dan sumberdaya yang ada. Bahwa Dinas ciptakarya melalui pelaksana fasilitasinya telah berhasil mengkordinasikan program PNPM ini sehingga PNPM yang notabebe merupakan program nasional yang dibiayai oleh APBN langsung, dapat berjalan beriringan dan bersinergi serta berkesinambungan dengan program dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banjar. Sehingga secara umum program ini berjalan dengan baik. Meskipun memang masih ada beberapa hal yang belum berjalans esuai target yang ditetapkan, terutama yang kaitannya dengan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena bidang ini memang tidak secara langsung di fasilitasi oleh Dinas CiptaKarya Kota Banjar. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan program ini antara lain adalah factor internal seperti kurangnya personil dan kewenangan yang terbatas, juga factor eksternal seperti kondisi social masyarakat dan factor lain yang mempengaruhi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perlu adanya upaya sistematis dan berkelanjutan serta sinergi oleh berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders dalam hal ini Kepala Dinas Ciptakarya, dalam mengkordinasikan program agar dapat diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas capaian program. Selain itu juga perlu upaya berkelanjutan dalam mengubah pola fikir dan social masyarakat dalam menerima suatu program yang berbentuk non fisik yang berkaitan dengan pemberdayaaan masyarakat, sehingga tujuan mulia dari Program PNPM MP ini dapat tercapai dengan baik dan berhasil.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi,2005: 87). Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005:111).

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi dan memecahkan masalah sosial masyarakat, terutama kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Penanggulanngan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat di Kota Banjar tentunya dilaksanakan seiring dengan prinsip otonomi daerah , dimana PNPM dilaksanakan melalui instansi Dinas Ciptakarya, Kebersihan, Tataruang Dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Namun pada kenyataanya program tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena permasalahan yang ada dilapangan adalah penguatan kelembagaan masyarakat tidak disertai dengan pendampingan yang intensif oleh Dinas terkait yang bersinggungan dengan program ini, sehingga seringkali permasalahan dilapangan adalah ketidak sinkronan perencanaan dan pelaksanaan program antara program PNPM dengan program Pemerintah Kota Banjar. Tentunya program ini harus didukung oleh penguatan sumber daya manusia yang baik, manajerial yang baik dan arah kebijakan yang tepat agar program PNPM mandiri perkotaan yang di gulirkan oleh pemerintah pusat membawa dampak yang baik bagi kemajuan kota Banjar.

Identifikasi Permasalahan Dalam Program PNPM adalah Permasalahan manajerial dan arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kota Banjar dalam program PNPM ini, dimana permasalahn yang timbul dilapangan adalah melemahnya partisipasi masyarakat, Sarana dan Sumberdaya, Hubungan Dinas ciptakarya dengan unsur-unsur terkait.. Karena program ini adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka pemerintah daerah seakan hanya menjadi penonton dalam pelaksanaanya, seringkali ada ketidak sinkronan program di masyarakat antara PNPM dengan pemerintah daerah, sehingga hasil dari mplementasi kebijakan ini dinilai kurang optimal bagi pemerintah kota banjar, khususnya dalam kaitannnya dengan pemberdayaan masyarakat miskin. PNPM merupakan suatu produk kebijakan dari pemerintah, Hal ini tentunya harus ada evaluasi dan perbaikan ke depannya.

* 1. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program PNPM di Kota Banjar?
2. Bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap PNPM di Kota Banjar?
   1. Tujuan Penelitian
3. Untuk mengetahui pelaksanaan program PNPM di Kota Banjar
4. Untuk mengetahui sejauhmana evaluasi yang dilakukan terhadap PNPM di Kota Banjar
   1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan, khusunya dalam pengembangan ilmu kebijakan publik.

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian dan referensi dalam mengevaluasi dan mengetahui keberhasilan program ini di masyarakat, sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam kelanjutan program ini selanjutnya.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

1. Hasil Penelitian Sebelumnya
2. Hasil Penelitian Endang Sri Purwanti 2012

Endang (2012) melakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Endang menggunakan variabel evaluasi kebijakan dengan dimensi ketersediaan perumahan murah, komoditas perumahan, *suply and demand*, dan ide tentang perumahan.

Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang, bahwa kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih belum terlihat nyata, belum ada program-program yang jelas terhadap penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program-program yang ada baru sebatas perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana dan prasana pemukiman. Pada akhirnya hasil analisis kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kebijakan yang jelas dan terarah mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tertuang didalam rencana, program, dan kegiatan.

1. Hasil Penelitian Latifah Hanum Daulay Tahun 2008

Latifah (2008) melakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Departemen Pendidikan nasional dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Siswa Sekolah Menengah kejuruan. Penelitian tersebut menggunakan variabel penelitian yaitu evaluasi kebijakan dengan faktor-faktor pemanfaatan program, alur pelaksanaan program, pengelolaan dana, persepsi dan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus penelitian dan kajian pada kebijakan biaya pendidikan SMK. Berdasarkan hasil penelitian Latifah menunjukan bahwa kebijakan pada Departemen Pendidikan nasional dalam meningkatkan jumlah siswa di SMK menunjukan bahwa pemerintah mempunyai andil besar dalam penentuan biaya pendidikan. Dana alokasi 20% biaya pendidikan dirasa masih kurang, sehingga berimbas pada besaran alokasi yang diterima oleh sekolah-sekolah, termasuk sekolah menengah kejuruan. Dengan dukungan dana yang minim, berdampak pada kemampuan sekolah dalam manajerial dan usaha untuk tetap eksis. Dan tentu hal ini berakibat dan berdampak pada peserta didik. Dimana beban biaya biasanya diserahkan pada siswa, sehingga biaya pendidikan yang ditanggung oleh masing-masing siswa semakin tinggi.

Hal ini tentu berpengaruh pada tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional yang merata dan adil diseluruh Indonesia. Pada kesimpulannya penelitian Latifah menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh departemen Pendidikan Nasional dalam pemerataan Biaya pendidikan masih sangat tidak memadai terutama untuk sekolah-sekolah yang letaknya didaerah. Pemerataan yang berkeadilan menurut persepsi masyarakat masih jauh dari apa yang dharapkan oleh masyarakat.

Penelitian Latifah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis juga menjadikan evaluasi kebijakan sebagai variabel utama dalam meneliti dan menelaah lebih jauh bagaimana pelaksanaan program PNPM di Kota banjar.

1. Konsep Kebijakan Publik

Ukuran kompleksitas dari pemerintahan modern itu yang kemudian antara lain dalam pandangan peters (1996 :3) memunculkan kebutuhan untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik dan bagaimana menilai efektifitas dan moralitas suatu kebijakan.

Dye dalam Islamy (2007:18) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai “public policy is whatever government choose to do or not tdo do”” (keijaksanaan negara adalah pilihan tindakan apapaun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”. Jadi pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan pengambilan keputusan.

* 1. Evaluasi kebijakan publik

Evaluasi adalah suatu cara untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi merupakan tahap akhir dari suatu analisis suatu kebijakan. Hal ini mengandung penjelasan bahwa :

1. Evaluasi adalah Usaha menganalisis hasil kebijakan berupa satuan nilainya
2. Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan
3. Hasil konkret yang memberi sumbangan terhadap tujuan atau sasaran kebijakan
4. Hasil tersebut dinyatakan dalam kinerja yang bermakna

Menurut Subarsono (2005: 120-121) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
2. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
3. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
4. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.
5. Mengukur dampak suatu kebijakan. Disini dapat berarti dampak positif ataupun dampak negatif. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Cara yang dilakukan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

William Dunn dalam bukunya Public Policy (2000: 610) menyebutkan ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur kriteria evaluasi kebijakan yaitu :

1. Efektivitas : tingkat capaian hasil yang diinginkan
2. Efisiensi : tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan : tingkat capaian hasil dapat memecahkan persoalan.
4. Pemerataan : tingkat pemerataan distribusi biaya dan manfaat pada kelompok masyarakat yang berbeda
5. Responsivitas : tingkat capaian hasil kebijakan dapat memuaskan preferensi/nilai kelompok
6. Ketepatan : tingkat capaian hasil bermanfaat

Apabila dibuat dalam bentuk pertanyaan maka dapat dirangkum seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Kriteria evaluasi kebijakan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kriteria | Pertanyaan |
| 1. | Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? |
| 2. | Efisiensi | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? |
| 3. | Kecukupan | Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan persoalan. |
| 4. | Pemerataan | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda? |
| 5. | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka? |
| 6. | Ketepatan | Apakah hasil yang dicapai bermanfaat? |

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Fungsi evaluasi kebijakan antara lain :

* Fungsi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
* Fungsi memberikan masukan untuk perbaikan suatu kebijakan atau implementasi kebijakan, apakah tujuan dan target dari implementasi kebijakan itu sesuai atau pantas dengan masalah yang dituju.
* Fungsi evaluasi juga memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

2.6.3 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri perkotaan (PNPM mandiri perkotaan

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan Khususnya :

* Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
* Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
* Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. esensi kerangka pemikiran itu berisi :

1. Alur jalan fikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoritik dan atau hasil penelitian yang relevan.
2. Kerangka logika yang mampu menunjukan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori.
3. Model penelitian yang dapat disajikan secara sistematis dan skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian.

Parameter evaluasi kebijakan/ kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2000 : 610) mencakup beberapa hal, yaitu :

* + - 1. Efektifitas
      2. Efisiensi
      3. Kecukupan
      4. Perataan
      5. Responsivitas
      6. Ketepatan

Secara sederhana kerangka pemikiran diatas dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4

Alur Kerangka Pemikiran

**PRESIDEN RI**

**PNPM Mandiri Perkotaan**

Diluncurkan tahun 2007

* + - 1. Efektifitas
      2. Efisiensi
      3. Kecukupan
      4. Perataan
      5. Responsivitas
      6. Ketepatan

AKTOR :

1. Pemerinah
2. Dinas Ciptakarya
3. Masyarakat

**HASIL/PENILAIAN**

PERUMUSAN KEBIJAKAN SELANJUTNYA

**BAB III**

**OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

1. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan PNPM mandiri perkotaan pada Dinas Ciptakarya di Kota Banjar ini dilaksanakan.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam dan komprehensif dan dinamis , tentang penilaian dari pelaksanaan kebijakan PNPM di Kota Banjar, bagaimana persepsi atau pandangan aparat dan masyarakat terhadap pelaksanaan program PNPM yang digulirkan oleh pemerintah pusat di Kota Banjar khususnya oleh Dinas Ciptakarya, kebersihan, Tataruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Seluruh data diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan wawancara dan obsevasi.

Argumentasi di atas, dikuatkan oleh pandangan Strauss and Carbin dalam Sukidin (2003:1) yang menandaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Desain Penelitian tentang evaluasi kebijakan PNPM pada Dinas Ciptakarya, kebersihan, Tataruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan yang berasal dari para informan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah Program PNPM mandiri perkotaan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi, pada Dinas Ciptakarya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan fokus penelitian, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, dan buku teks. Jadi sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu para informan dan dokumen tertulis.

Penentuan informan dilakukan menurut tujuan tertentu, Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :

1. Pejabat yang terkait dengan Program PNPM di lingkungan Dinas Ciptakarya, kebersihan, Tataruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, yakni Kepala Dinas Ciptakarya, kebersihan, Tataruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, Bapak Drs. Yoyo Suharyono,
2. Pejabat yang ditunjuk menjadi pelaksana satuan kerja PNPM pada Dinas CitptaKarya Kota Banjar, yakni Ibu Tanti S, ST.
3. Aparat dinas yang terkait langsung dengan proses Program PNPM, terutama yang ada di lingkungan Dinas Ciptakarya, kebersihan, Tataruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar,
4. Tokoh masyarakat/masyarakat yang dipandang dapat merepresentasikan dan mengetahui serta memahami masalah Program PNPM di Kota Banjar, yaitu :
5. Bapak Samsudin, S.Pd selaku kepala Desa jajawar
6. Bapak Oding Homsin selaku Kepala Desa Balokang
7. Ibu Rina Purnamasari, selaku Lurah mekarsari
8. Irfan Fauzi, selaku Lurah Banjar
9. Bapak Yayan suhiryan, selaku kepala desa Cibeureum
10. Bapak H. dedi Herdi, Spd selaku tokoh masyarakat kelurahan Situbatu
11. Fasilitator PNPM tingkat Kota Banjar yang terkait langsung dengan kebijakan PNPM di Kota Banjar antara lain Riga handita selaku Kordinator Kota Banjar PNPM MP Kota Banjar.
12. BKM dan KSM PNPM mandiri perkotaan di Kota Banjar dalam hal ini oleh Bapak Aco Warso selaku BKM kelurahan Situbatu

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Ciptakarya, kebersihan, Tataruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dimana institusi tersebut merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan Program PNPM di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Adapan alasan dalam memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan:

1. Adanya fenomena yang dianggap adanya kesenjangan antara program PNPM dan program pemerintah Kota dengan hasil atau kenyataannya yang dihasilkan dalam pelaksanaan Program PNPM di lingkungan Dinas Ciptakarya, kebersihan, Tataruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dan;
2. Institusi tersebut, merupakan lembaga strategis dalam menterjemahkan kebijakan PNPM khususnya di lingkungan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, sehingga *output*nya diharapkan mampu menghasilkan model Program PNPM yang berkualitas sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang artinya penelitian yang menekankan pada aspek filosofi dan psikologis, artinya lebih banyak menggunakan informasi-informasi dalam mengolah data yang ada berdasarkan pengalaman sudut pandang dari para informan yang terkait dengan subyek penelitian yang dibahas. Jadi sudut pandang dari para informan ini dijadikan dasar ataupun pondasi penelitian. Hal ini dipandang sangat penting untuk mengungkap dan mendalami sejauhmana tingkat capaian keberhasilan kebijakan PNPM mandiri perkotaan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Selain itu karena program PNPM ini dilaksanakan oleh masyarakat, maka diperlukan juga pendekatan terhadap unsur BKM dan KSM PNPM di Kota banjar, guna memperoleh informasi menyeluruh tentang pelaksanaan program ini. Pendekatan ini juga sangatlah penting untuk dilakukan untuk melihat obyektivitas pelaksanaan program ini di Masyarakat Kota Banjar.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara yakni :

* + - * 1. Observasi Non Partisipasi

Observasi Non-Partisipan Di sini posisi observer sebagai pengamat, ada di luar objek yang diamati.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) atau disebut juga wawancara tak terstruktur.

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini untuk itu dengan studi dokumentasi peneliti akan mengumpulkan buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan proses Program PNPM.

3.2.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data yakni : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Ketiga proses analisis data tersebut berperan penting dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

3.2.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam rangka proses pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengacu pada empat hal tersebut yaitu:

(1) *Credibility* atau derajat kepercayaan (kredibilitas) tehnik ini menentukan kredibilitas dalam penelitian dengan cara : (a) memperpanjang masa amatan; (b) amatan yang berkesinambungan; (c) *Trianggulasi*; (d) mendiskusikan dengan berbagai pihak yang berkompeten; (e) menganalisis kasus negatif; memakai referensi; (g) melakukan member check.

(2). *Transferability* atau daya keteralihan, konsep ini adalah pengganti konsep validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif

(3)  *Dependency* atau daya ketergantungan.

Baik sebagai *insider* maupun *outsider*, peneliti haruslah dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga yang menjadi kegiatan akhir setelah pengumpulan dan analisis data adalah intropeksi, yaitu kegiatan menganalisis nilai-nilai, dan prilakunya sendiri serta orang-orang yang berada dalam lingkungannya. Dengan demikian, semua perilaku yang teramati dan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan semua aparatur, konsisten dengan semua pemahaman yang mereka miliki. (Ibrahim & Syamsuddin, 1992:276-283). Selain intropeksi sebagai teknik untuk pemeriksaan keabsahan data, penelitian ini juga harus pula didukung oleh teknik lain untuk lebih memperkuat ciri khasnya sebagai salah satu penelitian kualitatif, yakni :

1. Ketekunan pengamatan.
2. *Trianggulasi*, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data tersebut (Moleong, 1989 : 195).
3. Diskusi dengan teman sejawat.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

Kota Banjar merupakan Kota otonom hasil peningkatan status dari Kota Administratif Banjar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang ditetapkan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 27 tahun 2002. Luas wilayah kota Banjar mencapai 131, 97 Km² dan berada pada ketinggian 20 sampai 500 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis, dengan batas administrasi sebagai berikut :

• Utara : Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Kecamatan Dayeuh Luhur dan Wanareja Kabupaten Cilacap

• Timur : Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap

• Selatan : Kabupaten Ciamis

• Barat : Kabupaten Ciamis

Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kota Banjar dapat dilihat pada data berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Luas (Km²)** | **Jumlah Desa/kelurahan** |
| 1  2  3  4 | Banjar  Pataruman  Purwaharja  Langensari | 26, 24  54, 06  18, 26  33, 41 | 7  7  4  7 |
| Jumlah | | 131,97 | 25 |

Jumlah penduduk Kota Banjar dari hasil pendataan tahun 2015 tercatat sebanyak 203. 512 jiwa dengan rincian sebanyak 102.137 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 101.475 jiwa berjenis kelamin perempuan, sehingga angka sex ratio adalah hampir 1 : 1, atau dapat dikatakan seimbang.

PNPM- Mandiri Perkotaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan terutama di Kota Banjar.

Berdasarkan buku pedoman PNPM - Mandiri Perkotaan tahun, dijelaskan bahwa program PNPM - Mandiri Perkotaan merupakan kelanjutan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dengan prinsip-prinsip pelaksanaan yaitu : bertumpu pada pembangunan manusia, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, otonomi dalam mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola, desentralisasi, mempunyai kesetaraan dan keadilan gender dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, pengambilan keputusan secara demokratis, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan kegiatan, prioritas kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kolaborasi antara semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan, keberlanjutan dan sederhana dalam pelaksanaan program.

maka dari itu arah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri adalah untuk mendukung upaya peningkatan indek pembangunan manusia (IPM). Lokasi pendampingan PNPM di Kota Banjar berjumlah 25 kelurahan/desa dengan jumlah dana yang dikucurkan sebesar Rp. 1.998.75.000.000 yang dicairkan selama dua tahap.

* 1. Pembahasan

1. Pelaksanaan program PNPM di Kota Banjar

Secara keseluruhan proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-MP) di Kota Banjar ini sudah cukup berhasil dari tahap proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian. Hal ini di kemukakan juga oleh Kordinator Kota Banjar sdr. Riga Handita dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 17 Oktober 2015 : ” *PNPM MP di Kota Banjar, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, sudah cukup baik terutama dari output ataupun hasil yang diperoleh, terutama yang kami anggap berhasil adalah dari pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan dana. Yang kurang itu pada program dana bergulir, itu masih membutuhkan pembinaan dari semua pihak*”.

Dari hasil pengamatan penulis PNPM Kota Banjar yang pendampingannya dilaksanakan oleh Dinas CiptaKarya Kota Banjar, telah banyak menghasilkan pembangunan infrastruktur lingkungan di masyarakat, dinataranya adalah pembnagunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilaksanakan dengan cara gotong royong dan swadaya dengan stimulasi dana dari PNPM melalui BKM dan KSM yang ada dan dibentuk oleh masyarakat.

Sesuai dengan data yang telah penulis peroleh, dimana sebagian besar stimulasi dana PNPM adalah pada bidang fisik dan infrastruktur lingkungan, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Bentuk Bantuan dan Swadaya dalam PNPM-MP di Kota Banjar tahun 2015 (Kecamatan Banjar)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Desa/kel** | **Kegiatan** | | **Dimensi (m)** | | | | **PNPM-MP** | **Swadaya** |
| **Jenis** | **Nama** | **P** | **L** | **T** | **Unit** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Mekarsari | SarPras | Perumahan |  |  |  | 7 | 105,000,000 | 46,958,000 |
|  |  |  | Saluran Drainase | 200 | 1 | 75 | 1 | 25,000,000 | 7,101,000 |
|  |  |  | perbaikan jalan | 230 |  |  | 2 | 30,000,000 | 10,924,000 |
|  |  | **Jumlah** |  |  |  |  |  | **160,000,000** |  |
|  |  | Simpan Pinjam | SPP |  |  |  | 1 | 10,000,000 |  |
|  |  | **Sub Total** |  |  |  |  |  | **170,000,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Banjar | SarPras | Pengaspalan Jalan | 490 | 2.5 |  | 1 | 36,450,000 | 1,434,000 |
|  |  | Pendidikan | Pelatihan Rias Manten |  |  |  | 1 | 1,800,000 |  |
|  |  | **Jumlah** |  |  |  |  |  | **38,250,000** |  |
|  |  | Simpan Pinjam | SPP |  |  |  |  | 10,500,000 |  |
|  |  | **Sub Total** |  |  |  |  |  | **48,750,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Situbatu | SarPras | Pembuatan Badan Jln | 275 | 3 |  | 1 | 31,750,000 | 1,464,000 |
|  |  |  | Saluran Drainase | 140 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7,000,000 | 503,000 |
|  |  | **Jumlah** |  |  |  |  |  | **38,750,000** |  |
|  |  | Simpan Pinjam | SPP |  |  |  |  | 10,000,000 |  |
|  |  | **Sub Total** |  |  |  |  |  | **48,750,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Balokang | SarPras | Saluran Drainase | 285 | 0.5 | 0.6 | 1 | 38,450,000 | 481,000 |
|  |  | Simpan Pinjam |  |  |  |  |  | 10,300,000 |  |
|  |  | **Sub Total** |  |  |  |  |  | **48,750,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Neglasari | SarPras | Sal. Drainase | 300 | 0.5 | 0.5 | 1 | 20,300,000 | 848,500 |
|  |  |  | Sal. Drainase | 40 | 0.3 | 0.4 | 1 | 20,450,000 | 155,000 |
|  |  | **Jumlah** |  |  |  |  |  | **40,750,000** |  |
|  |  | Simpan Pinjam | SPP |  |  |  | 1 | 8,000,000 |  |
|  |  | **Sub Total** |  |  |  |  |  | **48,750,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cibeureum | SarPras | Saluran Drainase | 274 | 0.5 | 0.5 | 1 | 40,950,000 | 647,000 |
|  |  | Simpan Pinjam | SPP |  |  |  |  | 7,800,000 |  |
|  |  | **Sub Total** |  |  |  |  |  | **48,750,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jajawar | SarPras | Sal. Drainase | 200 | 0.5 | 0.6 | 1 | 19,250,000 | 526,000 |
|  |  | N | Sal. Drainase | 150 | 0.3 | 0.4 | 1 | 20,100,000 | 438,500 |
|  |  | **Jumlah** |  |  |  |  |  | **39,350,000** |  |
|  |  | Simpan Pinjam | SPP |  |  |  | 1 | 9,400,000 |  |
|  |  | **Sub Total** |  |  |  |  |  | **48,750,000** |  |

Sumber : Laporan Pelaksanaan PNPM-MP Kota banjar Tahun 2015

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan PNPM secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya oleh BKM maupun oleh fasilitator PNPM MP tingkat Kota.

Program PNPM MP yang dilaksanakan di Kota Banjar mempunyai sasaran dalam pemberdayaan masyarakat penerima manfaat, terutama dalam pelibatan warga miskin yang ada dalam wilayah penerima sasaran. Menurut Koordinator Fasilitator Kota (Korkot) Kota Banjar, saudara Riga Handita dalam wawancara dengan Penulis tanggal 17 oktober 2015 mengatakan, *“PNPM ini kan tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat, yang pada intinya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat yang masih tergolong miskin, dengan berbagai macam cara yang dilaksanakan oleh PNPM MP, sebagian besar dari orang miskin sudah aktif dalam setiap tahapan kegiatan PNPM-MP baik yang diselenggarakan oleh kecamatan itu sendiri maupun yang di adakan di desa namun ada beberapa hambatannya. Namun mengingat kesibukan masyarakat, tidak semua yang diundang dapat menghadiri pertemuan baik yang diadakan di desa maupun di kecamatan.”*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan warga miskin dalam kegiatan tersebut sudah cukup bagus. Dan dari pengamatan yang dilakukan penulis pada wilayah penerima manfaat program PNPM ini, memang masyarakat antusias untuk berperan serta dalam setiap kegiatan yang terkait dengan kegiatan PNPM, misalnya dalam rapat2, gotong royong pengerjaan infrastruktur, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang di motori oleh Badan keswadayaan masyarakat (BKM) ataupun Kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Dari hasil pengamatan Penulis yang dilaksanakan disalah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Situbatu, Kota Banjar, dalam kegiatan-kegiatan pertemuan dan kegiatan PNPM ini memang cukup terlihat antusiasme warga terutama warga miskin. Sehingga dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan warga miskin memang cukup tinggi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini.

Selain keterlibatan orang miskin dalam keiatan PNPM MP, kehadiran perempuan dalam kegiatan juga merupakan sebuah hal yang penting sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat, dan terlaksananya kegiatan PNPM mandiri perkotaan di Kota Banjar. Seperti yang disampaikan oleh ketua BKM PWD situbatu dalam awancara dengan Penulis pada tanggal 23 November 2015, mengatakan *“kehadiran kaum perempuan merupakan bagian dari pemberdayaan masyrakat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif, jadi kaun perempuan juga memegang peranan penting dalam PNPM secara umum.”*

Bentuk keswadayaan yang diberikan masing-masing masyarakat desa/kelurahan di Kota Banjar dari hasil pengamatan penulis pada umumnya adalah sama yaitu berupa tenaga untuk membantu pembangunan, materi atau uang untuk membantu pembelian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan sarana prasarana, dan bantuan berupa makanan dan minuman sebagai konsumsi untuk para pekerja.

Menurut bapak Drs. H. Dedi Herdi selaku ketua LPM kelurahan situbatu yang penulis mintai keterangan, mengatakan *”selama ini memang kegiatan-kegiatan pembangunan di Situbatu banyak dibantu oleh PNPM ini, dan meskipun dana yang dikucurkan hanya berbentuk stimulan dan modal, tapi masyrakat mau membantu bahu membahu, misalnya dalam pembuatan jalan baru, masyarakat yang punya tanah menghibahkan tanahnya untuk jalan.”*

Hal ini memang relevan dengan kegiatan PNPM MP yang sebagian besar berbentuk penataan infrastruktur. Dari data yang penulis peroleh dalam dokumen PNPM MP Kota Banjar, secara umum kegiatan fisik dan infrastruktur adalah pembangunan jalan dan drainase lingkungan yang membutuhkan lahan dalam pelaksanaan pembangunannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya atau memiliki daya untuk ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga konsep pembangunan partisipatif harus juga dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, adakalanya tanpa dibarengi pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat hanya dilibatkan dalam aspek-aspek teknis tertentu tanpa peran yang lebih luas mengenai pengambilan keputusan dan sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Dengan demikian kegiatan PNPM MP di Kota Banjar, telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembanguan dan pemberdayaan masyarkat, dimana dalam setiap kegiatan ada swadaya masyarakat meskipun belum maksimal, sebagai bagian dari partisipasi pembangunan.

* + 1. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar
  1. Efektifitas

Dengan adanya bantuan sarana prasarana ekonomi dasar sangat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat desa. Dengan adanya bantuan berupa sarana prasarana, bagi masyarakat khususnya orang-orang miskin sangat dirasakan kemanfaatannya. Karena mereka menjadi bisa berpenghasilan kembali dengan memanfaatkan bantuan dari PNPM-MP. Sehingga dapat dikatakan bahwa PNPM-MP telah berjalan dengan sangat efektif apabila dilihat dari segi kemanfaatan bantuan sarana prasarana bagi masyarakat.

Pemanfaatan bantuan ekonomi yang diberikan oleh PNPM-MP bagi masyarakat miskin terutama perempuan adalah untuk tambahan modal usaha guna memberikan tambahan penghasilan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari agar bisa mensejahterakan kehidupan keluarga. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan PNPM-MP sudah berjalan dengan sangat efektif apabila dilihat dari tingkat kemanfaatan bantuan ekonomi oleh masyarakat.

Dari usaha pemerintah selama kurun waktu tahun 2015, proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan sudah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana strategis penanggulangan kemiskinan Kota Banjar. Namun jika ditinjau lebih mendalam pada lokasi penelitian masih ada beberapa aspek yang belum tertangani dengan baik melalui bantuan PNPM Mandiri. Misalnya saja pada pembangunan infrastruktur di Kelurahan Situbatu. Pada gambaran umumnya masih jelas bahwa jalan perkampungan belum diperbaiki dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu aspek yang lainnya seperti fasilitas umum sudah diperbarui dengan baik. Sehingga masyarakat Situbatu dapat memenuhi kebutuhan sehari–harinya serta lebih meningkatkan kegiatan perekonomian melalui bantuan dana bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan.

* 1. Efisiensi kebijakan PNPM di Kota Banjar

Hal ini berkaitan dengan bagaimana lembaga – lembaga sosial yang ada di dalam Kelurahan Situbatu dan kelurahan/ desa lainnya berusaha untuk mengentaskan permasalahan warganya dari jeratan kemiskinan. Oleh sebab itu di dalam setiap kelurahan terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membantu warganya untuk meningkatkan perekonomian, baik itu dengan bantuan dana bergulir yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun dana langsung yang berguna untuk menyejahterakan masyarakatnya dari aspek pendidikan, sosial dan ekonomi khususnya warga miskin. Usaha – usaha BKM untuk membantu masyarakatnya yang ada di 2 kelurahan tersebut dinilai sudah cukup maksimal dalam kinerjanya. Hal ini ditinjau secara lebih mendalam melalui wawancara dengan Ketua BKM Situbatu yaitu Bapak Suhendar. Beliau mengungkapkan bahwa BKM Situbatu yang terdiri dari 9 orang anggota tersebut telah bekerja secara maksimal untuk melakukan perubahan secara fisik di daerahnya

* 1. Kecukupan

Dengan adanya program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat yaitu PNPM Mandiri Perkotaan, berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan mengenai keberhasilan pelaksanaan PNPM di Kota Banjar. Dalam pelaksanaannya yang sudah diimplementasikan di lapangan, banyak warga yang tergolong kurang mampu yang sudah dapat terpenuhi hak atau kebutuhan dasarnya seperti makanan dan rumah yang layak. Hal ini dapat dibuktikan dengan bantuan langsung oleh pemerintah berupa raskin, bantuan dari program PNPM berupa fasilitas umum (perbaikan infrastruktur, MCK, sanitasi), bantuan bedah rumah. Selain itu yang penulis temui di lapangan yaitu pelaksanaan bedah rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan.

1. Perataan

Apabila berbicara mengenai perataan pendistribusian biaya yang dikucurkan oleh pemerintah pusat secara langsung, hal ini belum dapat diperkirakan lebih mendetail apakah biaya tersebut benar – benar merata di setiap kelompok masyarakat. Akan tetapi sejauh yang penulis temui di lapangan yaitu Kelurahan situbatu dan kelurahan Situbatu, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap BKM berusaha untuk memberikan bantuan secara merata ke tiap warga yang termasuk masyarakat miskin. Selain itu, biaya untuk PNPM sendiri adalah berawal dari pengajuan proposal dari masyarakat. Sehingga besarnya dana juga tergantung dari pemerintah pusat yang berhak mengeluarkan jumlah dana untuk masyarakat penerima manfaat tersebut.

1. Responsivitas

Dengan diberlakukannya PNPM Mandiri Perkotaan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masyarakat penerima pun tentu memiliki respon yang bermacam – macam. Akan tetapi yang penulis temui sebagian besar penerima manfaat dapat merasakan hasil dari usahanya setelah menerima bantuan PNPM Mandiri. Misalnya saja Unit Pelaksana Sosial di Kelurahan situbatu. Kelompok masyarakat ini melaksanakan bimbingan belajar bagi anak SD untuk menambah jam belajar di luar jam sekolah. Orang tua para murid ini pun tentu sangat berantusias karena selain tidak dipungut biaya terlalu mahal seperti di lembaga bimbingan belajar, tempat pelaksanaan kegiatannya pun sangat dekat dari rumah. Selain itu pengajar sendiri berasal dari warga Kelurahan situbatu yang berkompetensi untuk mengajar mata pelajaran murid SD.

1. Ketepatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ini dinilai cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan di  beberapa wilayah yang masih terdapat masyarakat atau keluarga yang tergolong miskin. Sasaran penerima manfaat dapat diketahui dengan melakukan survey langsung. Yaitu dengan mendatangi rumah masyarakat tidak mampu tersebut. Dengan melakukan survey langsung, pemerintah tidak melakukan kesalahan sasaran sehingga pelaksanaan PNPM di Kota Banjar khususnya yang di fasilitasi dan dimonitoring oleh Dinas Ciptakarya Kota Banjar berjalan dengan cukup efektif dengan melihat kondisi lapangan yang sebenarnya.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang evaluasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat pada Dinas Cipta Karya Kota Banjar tahun 2015.

Proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan sudah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana strategis penanggulangan kemiskinan Kota Banjar. Efektifitas PNPM MP di Kota Banjar dapat berjalan cukup baik  pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini dibuktikan dengan adanya  pembangunan yang dilakukan terus – menerus terkait kegiatan perekonomian warga, perbaikan jalan, fasilitas umum dan  pembangunan rumah bagi warga miskin. Menurut  penulis pelaksanaan PNPM di Kota Banjar ini sudah mengalami progress dalam pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Karena sebelum dilaksanakan PNPM tahun 2007, kehidupan perekonomian sangatlah memprihatinkan. Jeleknya fasilitas umum dan lingkungan serta banyaknya rumah-rumah tidak layak huni menjadi masalah dalam setiap perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan.

Kemudian berkaitan dengan bagaimana lembaga – lembaga sosial yang ada di dalam Kelurahan Situbatu dan kelurahan/ desa lainnya berusaha untuk mengentaskan permasalahan warganya dari jeratan kemiskinan. Usaha – usaha BKM untuk membantu masyarakatnya yang ada di 2 kelurahan tersebut dinilai sudah cukup maksimal dalam kinerjanya.

Berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat yaitu PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaannya yang sudah diimplementasikan di lapangan, banyak warga yang tergolong kurang mampu yang sudah dapat terpenuhi hak atau kebutuhan dasarnya seperti makanan dan rumah yang layak serta fasilitas umum yang cukup memadai, sehingga dari segi kecukupan program ini sudah cukup baik.

Apabila berbicara mengenai perataan pendistribusian biaya yang dikucurkan oleh pemerintah pusat secara langsung, hal ini belum dapat diperkirakan lebih mendetail apakah biaya tersebut benar – benar merata di setiap kelompok masyarakat. Akan tetapi sejauh ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap BKM berusaha untuk memberikan bantuan secara merata ke tiap warga yang termasuk masyarakat miskin. Selain itu, biaya untuk PNPM sendiri adalah berawal dari pengajuan proposal dari masyarakat. Sehingga besarnya dana juga tergantung dari pemerintah pusat yang berhak mengeluarkan jumlah dana untuk masyarakat penerima manfaat tersebut.

Dengan diberlakukannya PNPM Mandiri Perkotaan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masyarakat penerima pun tentu memiliki respon yang bermacam – macam. Penulis menemukan sebagian besar penerima manfaat dapat merasakan hasil dari usahanya setelah menerima bantuan PNPM Mandiri. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan ini sangat diterima oleh masyarakat dan stekholder yang ada.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) ini dinilai cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah yang masih terdapat keluarga yang tergolong miskin dan kawasan kumuh/infrastruktur tertinggal. sehingga penulis menyimpulkan bahwa hasil dari program ini sangat bermanfaat luas di masyarakat.

1. **Saran**

Adapun saran yang penulis berikan dalam masalah ini antara lain, yaitu :

1. Peningkatan mutu pembangunan dan pemerdayaan lingkungan melalui sumber daya manusia (SDM) yang mapan dan berkualitas harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan upaya pendampingan secara lebih intens dan mendasar kepada masyarakaat penerima manfaat, kelompok swadaya masyarakat maupun kerjasama yang lebih baik dengan fasilitator program yang telah ada.
2. Dinas Ciptakarya di Kota Banjar perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan bagi wilayah yang dianggap paling berhasil dalam mengelola program ini, sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat lain agar semakin meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan program, dan penumbuhan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses pembnagunan partisipatif dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.
3. Sarana dan prasarana baik segi administrasi maupun non administrais yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas capaian program sebaiknya lebih dilengkapi dan bias difasilitasi oleh berbagai stakeholder, baik oleh dinas ciptakarja sebagai leading sector pendampingan maupun oleh unsur kewilayahan seperti kelurahan dan desa, karena dengan adanya sarana yang baik bisa membuat pelaksanaan program pada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.
4. Program PNPM atau pemberdayaan masyarakat pola partisipatif dan berbasis komunitas dan lingkungan sebaiknya tetap diprioritaskan karena bisa mendidik masyarakat untuk berdaya dan merasa memiliki dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah.
5. Pelaksanaan PNPM di Kota Banjar hendaknya dilakukan secara teliti dan hati – hati agar masyarakat penerima manfaat benar – benar berasal dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin, agar dana dari  pemerintah pusat benar – benar berguna untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Banjar.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku**

Dunn, William N. 2000. Pengantar Administrasi Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Dye, Thomas R. 1972. Understanding public Policy. Garamond : Electra graphics,Inc

Luankali, Bernadus. 2007. Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jakarta : Amelia

Islamy, M. irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gava media

Suparlan, Parsudhi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama

Moleong, lexy J dan Tjun suryaman. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2003.Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : PT. Hanindita Grahawidya

Nogi S. Tangkilisan, Hessel. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik : Yogyakarta. Balairung

Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Suyanto, Bagong. 2000. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan,* Edisi Pertama. Jakarta: Erlangga

Suyanto, Bagong. 2013. Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Malang : In Trans Publishing Wisma Kali Metro.